



LAPORAN KEUANGAN AUDITED 2025



Unit Pelayanan Kesehatan

**Jl. H. R. Rasuna Said Blok X5, No.Kav. 4-9
Jakarta Selatan**

KATA PENGANTAR



Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Unit Pelayanan Kesehatan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2023 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 30 April 2026,
Plt. Kepala Unit Pelayanan Kesehatan



Ni Nengah Yustina Tutuanita, SKM, M.K.M
NIP 198403232009122003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB.....	v
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN.....	2
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	4
II. NERACA	5
III. LAPORAN OPERASIONAL	7
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	9
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	10
A. PENJELASAN UMUM	10
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGRAN	21
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	29
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	39
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	47
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	50

DAFTAR TABEL

I.	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	4
II.	NERACA	5
III.	LAPORAN OPERASIONAL	7
IV.	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	9
V.	CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	15
Tabel A.1	Kategori penyisihan piutang tak tertagih	15
Tabel A.2	Masa Manfaat Aset Tetap	18
Tabel A.3	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	19
Tabel B	Rincian Pagu Awal dan Pagu Revisi.....	21
Tabel B.1.1	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan.....	22
Tabel B.1.2	Perbandingan Realisasi Pendapatan.....	22
Tabel. B.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja	23
Tabel. B.2.1	Perbandingan Realisasi Belanja	24
Tabel.B.3	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai	25
Tabel. B.4	Perbandingan Realisasi Belanja Barang	26
Tabel. B.5	Realisasi Belanja Modal	27
Tabel. B.5.1	Perbandingan Belanja Modal Peralatan & Mesin	28
Tabel. B.5.2	Rincian Pembelian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28
Tabel. C.1.1	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	29
Tabel. C.1.2	Rincian Piutang PNPB.....	30
Tabel C.1.5	Rincian Persediaan TA 2025 dan 2024.....	31
Tabel. C.2.1	Mutasi Peralatan dan Medis.....	32
Tabel. C.2.2	Pembelian Peralatan dan Mesin TA 2025	32
Tabel. C.2.3	Transfer Masuk Peralatan dan Mesin TA 2025.....	33
Tabel. C.3.1	Rincian Aset Tak Berwujud.....	34
Tabel. C.3.2	Mutasi Aset Lain - Lain	34
Tabel. C.3.2.1	Rincian Mutasi Aset Lain - Lain	35
Tabel. C.3.3	Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya.....	35
Tabel. C.3.4	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga TA 2025	37
Tabel. C.3.5	Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan TA 2025	37
Tabel D.1	Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2025 dan 2024	39
Tabel D.2	Perbandingan Beban Pegawai 31 Desember 2025 dan 2024	40
Tabel D.3	Perbandingan Beban Persediaan 31 Desember 2025 dan 2024.....	41
Tabel D.4	Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025 dan 2024	42

Tabel. D.5 Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 dan 2024	43
Tabel. D.6 Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 2024.....	44
Tabel. D.7 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 dan TA 2024.....	45
Tabel. D.8 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2025 dan 2024 ...	45
Tabel. E.4 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas	48
Tabel. E.5.2 Rincian Transfer Keluar	42

DAFTAR GRAFIK

Grafik B.2 Komposisi Anggaran dan Realisasi dan Realisasi Belanja TA 202523

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Audited Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Audited TA 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Audited TA 2025 tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 30 April 2026
Plt. Kepala Unit Pelayanan Kesehatan



Ni Nengah Yustina Tutuanita, SKM, M.K.M
NIP 198403232009122003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Audited Tahun 2025 Unit Pelayanan Kesehatan ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan - LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Nilai Pendapatan PNBPN dan Realisasi Belanja Unit Pelayanan Kesehatan pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 700.444.268,00 atau mencapai 118 persen dari target alokasi pendapatan sebesar Rp595.000.000,00 dan realisasi belanja Rp 12.592.277.013,00 atau mencapai 95 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 13.281.797.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 5.623.252.652,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 2.663.803.869,00; Aset Tetap sebesar Rp 2.959.448.783,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp 0,00. Kemudian nilai Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp 5.623.252.652,00 yang merupakan keseluruhan jumlah ekuitas.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan operasional, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan negara bukan pajak untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp

699.510.268,00 lalu jumlah beban operasional adalah sebesar Rp 12.678.080.029,00. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Lainnya adalah sebesar (Rp 11.978.569.761,00). Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp 89.204.094,00). Surplus/Defisit dari Pos-Pos Luar Biasa adalah sebesar (Rp 12.067.773.855,00) dan surplus/defisit-LO adalah sebesar (Rp 12.067.773.855,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal sebesar Rp 5.681.016.199,00 dikurangi Surplus/Defisit - LO sebesar (Rp 12.067.773.855,00) kemudian ditambah dengan Koreksi yang menambah / mengurangi ekuitas sebesar Rp 245.311.371,00 ditambahkan dengan transaksi antar entitas Rp 11.764.698.937,00 sedangkan untuk kenaikan/penurunan ekuitas (Rp 57.763.547,00) Sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp 5.623.252.652,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode Tahunan yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas Audited untuk TA 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNIT PELAYANAN KESEHATAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	Desember 2025		REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	Desember 2024
		ANGGARAN	REALISASI			REALISASI
1		2	3	4		3
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH						
1. PENERIMAAN NEGARA						
a. Penerimaan Perpajakan		-	-	-		-
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	595.000.000	700.444.268	105.444.268	117,72	660.473.171
2. HIBAH		-	-	-		-
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH		595.000.000	700.444.268	105.444.268	117,72	660.473.171
BELANJA NEGARA						
Rupiah Murni						
Belanja Pegawai	B.3	6.221.755.000	6.190.685.675	(31.069.325)	99.50	6.551.127.718
Belanja Barang	B.4	6.461.691.000	5.812.462.058	(649.228.942)	89.95	6.842.534.130
Belanja Modal	B.5	598.351.000	589.129.280	(9.221.720)	98.46	2.659.646.000
JUMLAH BELANJA		13.281.797.000	12.592.277.013	(689.519.987)	95	16.053.307.848



Jakarta, 30 April 2026
Plt. Kepala Unit Pelayanan Kesehatan

Ni Nengah Yustina Tutuanita, SKM, M.K.M
NIP 198403232009122003

II. NERACA

UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

NAMA PENARIKAN	Ref	JUMLAH		KENAIKAN (Penurunan)	
		2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
ASET					
ASET LANCAR	C.1				
Piutang Bukan Pajak	C.1.2	5.123.800	6.057.800	(934.000)	(15,42)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.3	(25.620)	(30.290)	4.670	(15,42)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.1.4	5.098.180	6.027.510	(929.330)	(15,42)
Persediaan	C.1.5	2.658.705.689	2.138.549.045	520.156.644	24,32
JUMLAH ASET LANCAR		2.663.803.869	2.144.576.555	519.227.314	24.21
ASET TETAP	C.2				
Peralatan dan Mesin	C.2.1	26.532.561.139	25.735.964.174	690.595.965	3,10
Akumulasi Penyusutan	C.2.2	(23.573.112.356)	(22.205.940.155)	(1.261.172.201)	6,16
JUMLAH ASET TETAP		2.959.448.783	3.530.024.019	(570.575.236)	(16,16)
ASET LAINNYA	C.3				
Aset Tak Berwujud	C.3.1	1.001.960.000	1.001.960.000	0	0
Aset Lain-lain	C.3.2	2.678.291.112	2.576.738.897	101.552.215	3,94
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(3.680.251.112)	(3.572.283.272)	(107.967.840)	3,02
JUMLAH ASET LAINNYA		0	6.415.625	(6.415.625)	(100,00)
JUMLAH ASET		5.623.252.652	5.681.016.199	(60.859.489)	(1,07)
EKUITAS					
Ekuitas	C.4	5.623.252.652	5.681.016.199	(57.763.547)	(1,02)
JUMLAH EKUITAS		5.623.252.652	5.681.016.199	(57.763.547)	(1,02)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.623.252.652	5.681.016.199	57.763.547	(1,02)

Jakarta, 30 April 2026
Plt. Kepala Unit Pelayanan Kesehatan



Ni Nengah Yustina Tutuanita, SKM, M.K.M
NIP 198403232009122003

III. LAPORAN OPERASIONAL

UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENKES RI LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	JUMLAH	
		2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		699.510.268	665.068.271
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	699.510.268	665.068.271
PENDAPATAN HIBAH			
Pendapatan Hibah		-	-
Jumlah Pendapatan Hibah		-	-
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		699.510.268	665.068.271
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	6.190.685.675	6.551.127.718
Beban Persediaan	D.3	2.565.500.027	2.567.997.443
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.446.475.993	1.498.484.803
Beban Pemeliharaan	D.5	833.919.833	1.452.127.401
Beban Perjalanan Dinas	D.6	475.383.030	984.404.450
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		-	-
Beban Hibah		-	-
Beban Bantuan Sosial		-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1.166.120.141	1.493.668.434
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	(4.670)	30.290
Beban Lain-Lain		-	-
JUMLAH BEBAN		12.678.080.029	14.547.840.539
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(11.978.569.761)	(13.882.772.268)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	D.9	-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	D.10	(89.204.094)	(7.279.498)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		89.204.094	7.279.498
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		(89.204.094)	(7.279.498)
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(12.067.773.855)	(13.890.051.766)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	D.10	(12.067.773.855)	(13.890.051.766)

Jakarta, 30 April 2026
Plt. Kepala Unit Pelayanan Kesehatan



Ni Nengah Yustina Tutuanita, SKM, M.K.M
NIP 198403232009122003

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENKES RI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat	Jumlah	
		2025	2024
1		2	2
Ekuitas Awal	E.1	5.681.016.199	4.199.577.470
Surplus/Defisit – Lo	E.2	(12.067.773.855)	(13.890.051.766)
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi	E.3	245.311.371	7.328
Penyesuaian Nilai Aset		-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	245.311.371	-
Koreksi Atas Relaksifikasi		-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi		-	-
Lain-Lain	E.3.2	-	7.328
Transaksi Antar Entitas	E.4	11.764.698.937	15.371.483.167
Kenaikan / Penurunan Ekuitas		(57.763.547)	1.481.438.729
Ekuitas Akhir	E.5	5.623.252.652	5.681.016.199

Jakarta, 30 April 2026
 Plt. Kepala Unit Pelayanan Kesehatan

 Ni Nengah Yustina Tutuanita, SKM, M.K.M
 NIP 198403232009122003

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

Unit Pelayanan Kesehatan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No.2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan HR.Rasuna Said Blok X5 Kav.4-9 Kuningan, Jakarta Selatan.

Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes berkomitmen dengan visi *“Menjadi Klinik Utama Percontohan Yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Yang Terbaik Bagi Karyawan Dan Masyarakat Umum”* Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang professional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan asset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik Negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar. Konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes adalah sebagai berikut:

Pendapatan-

LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN)

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

Pendapatan-LO (2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja (3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut Klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi asset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan /Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung

dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel A.1
Kategori penyisihan piutang tak tertagih

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai

Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk persatuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain

pada pos Aset Lainnya

- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel A.2
Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 Tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam

Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel A.3
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan

Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali*

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Tabel B
Rincian Pagu Awal dan Pagu Revisi
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025

URAIAN	2025	
	ANGGARAN/ ESTIMASI PENDAPATAN AWAL	ANGGARAN/ ESTIMASI PENDAPATAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	595.000.000	595.000.000
Jumlah Pendapatan	595.000.000	595.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	8.845.422.000	6.221.755.000
Belanja Barang	4.060.350.000	6.461.691.000
Belanja Modal	73.032.000	598.351.000
Jumlah Belanja	12.978.804.000	13.281.797.000

Untuk Laporan Keuangan tahun anggaran 2025, Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes telah melakukan 12 kali revisi anggaran. Hal tersebut dilakukan karena adanya buka blokir anggaran sewa kendaraan, blokir anggaran perjalanan dinas berdasarkan instruksi Menteri Keuangan melalui surat Langkah-langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA Tahun 2024 Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024, penambahan belanja Obat, BMHP dan reagen, penambahan pemeliharaan alkes dan penambahan belanja modal serta penyesuaian pelaksanaan anggaran sehingga realisasi anggaran dapat dilaksanakan dengan optimal.

*Realisasi
Pendapatan
Rp700.44
4.268,00*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp700.444.268,00 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp595.000.000,00. Pendapatan Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI terdiri dari pendapatan fungsional umum dan fungsional khusus,

pendapatan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Pendapatan fungsional khusus: Pendapatan dari BPJS kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL), pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) serta Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan.

Tabel B.1.1
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025

Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg
425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	500.000.000	586.241.468	117,25
425312	Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat	-	33.142.800	-
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	95.000.000	81.060.000	85,33
Jumlah		595.000.000	700.444.268	117,72

Sedangkan untuk rincian perbandingan realisasi pendapatan 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel B.1.2
Perbandingan Realisasi Pendapatan
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024

AKUN	KETERANGAN	TAHUN ANGGARAN		NAIK (TURUN) %
		2025	2024	
425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	586.241.468,	554.957.271,	5,64
425312	Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat	33.142.800,	27.888.900,	18,84
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	81.060.000,	77.627.000,	4,42
	JUMLAH TOTAL	700.444.268	660.475.195	6,05

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp39.971.098,00 atau 6,05% dibandingkan 31 Desember 2024. Kenaikan realisasi pendapatan antara lain disebabkan oleh: Bertambahnya jumlah dana Kapitasi BPJS pada klinik Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes.

Realisasi
Belanja
Rp12.592.277.013,00

B.2. Belanja

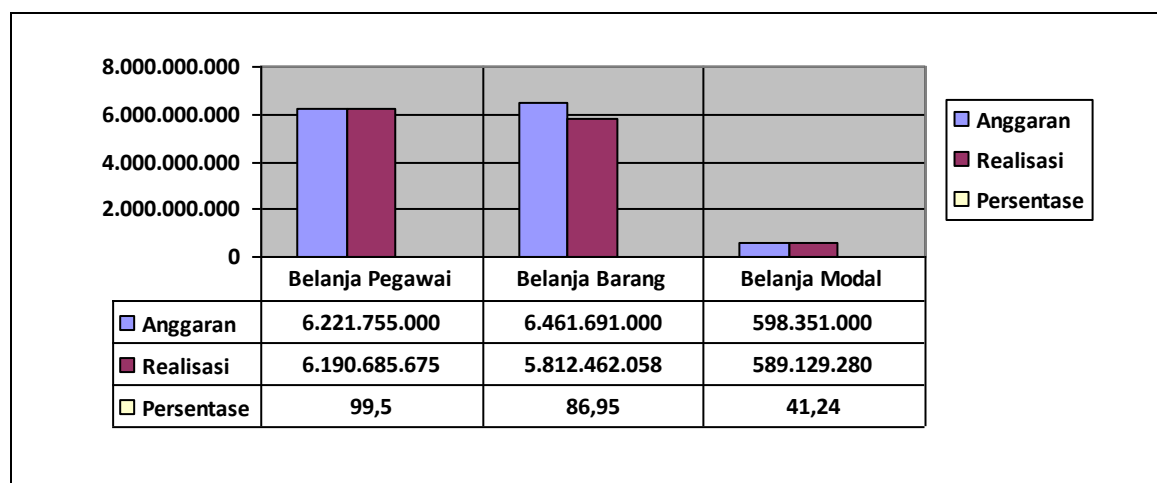
Realisasi Belanja Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp12.592.277.013,00 atau 94,8% dari Anggaran Belanja sebesar Rp13.281.797.000,00. Rincian Anggaran dan Realisasi berdasarkan jenis belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel B.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025

URAIAN	2025		
	ANGGARAN	REALISASI	NAIK/ TURUN (%)
Belanja Pegawai	6.221.755.000	6.190.685.675	99,50
Belanja Barang	6.461.691.000	5.812.462.058	89,95
Belanja Modal	598.351.000	589.129.280	98,46
Jumlah	13.281.797.000	12.592.277.013	94,81

Komposisi Anggaran dan Realisasi berdasarkan jenis belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik B.2
Komposisi Anggaran dan Realisasi dan Realisasi Belanja
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025



Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp4.627.848.192,00 dan Rp5.396.269.705,00. Rincian perbandingan realisasi belanja adalah sebagai berikut:

Tabel B.2.1
Perbandingan Realisasi Belanja
Untuk Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

URAIAN	2025		2024		NAIK/ TURUN (%)
	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
BELANJA					
Belanja Pegawai	6.221.755.000	6.190.685.675	6.802.984.000	6.551.127.718	-5,50
Belanja Barang	6.461.691.000	5.812.462.058	6.916.369.000	6.842.434.130	-15,05
Belanja Modal	598.351.000	589.129.280	2.660.052.000	2.659.646.000	-77,85
Jumlah Belanja	13.281.797.000	12.592.277.013	16.379.405.000	16.053.207.848	-21,56

Realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp3.460.930.835,00) atau 21 % dibandingkan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2025 Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI mendapatkan efisiensi belanja barang seperti belanja penambah daya tahan tubuh dan lain-lain sesuai edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.

Belanja
Pegawai

B.3 Belanja Pegawai

Rp

6.190.685.
675,00

Realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp6.190.685.675,00 dan Rp6.551.127.718,00. Rincian perbandingan realisasi belanja pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel B.3
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024

AKUN	URAIAN	JUMLAH		NAIK/ TURUN (%)
		2025	2024	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.658.559.700	1.795.640.000	-7,63
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.676	24.140	-14,35
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	111.337.990	120.372.440	-7,51
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	27.875.976	32.040.470	-13,00
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	10.080.000	25.200.000	-60,00
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	226.065.000	252.670.000	-10,53
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	22.757.153	24.423.901	-6,82
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	79.372.320	87.555.780	-9,35
511129	Belanja Uang Makan PNS	241.143.000	238.083.000	1,29
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	27.600.000	27.600.000	0,00

AKUN	URAIAN	JUMLAH		NAIK/ TURUN (%)
		2025	2024	
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	5.110.000	5.109.850	0,00
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	239.285.432	182.360.800	31,22
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.200	3.761	11,67
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	14.050.776	9.266.000	51,64
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	2.973.548	1.596.912	86,21
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	29.500.000	23.760.000	24,16
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	12.196.735	8.255.880	47,73
511628	Belanja Uang Makan PPPK	39.229.000	28.668.000	36,84
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	740.000	-	#DIV/0!
512211	Belanja Uang Lembur	278.668.000	263.538.000	5,74
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	46.941.000	31.899.000	47,16
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2.781.838.310	3.128.990.961	-11,09
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	335.336.859	264.068.823	26,99
	Jumlah	6.190.685.675	6.551.127.718	-5,50

Realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp360.442.043,00 atau 5,50% dibandingkan 31 Desember 2024. Penurunan realisasi belanja pegawai dikarenakan adanya pegawai PNS mutasi dan pensiun serta kebijakan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja Calon Pegawai Negeri Sipil Penerimaan Tahun 2025 dibayarkan oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi penurunan belanja pegawai khususnya gaji pokok dan tunjangan kinerja.

Belanja

Barang

Rp5.812.4

62.058,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp5.812.462.058,00 dan Rp6.842.534.130,00. Rincian perbandingan realisasi belanja barang adalah sebagai berikut:

Tabel B.4
Perbandingan Realisasi Belanja Barang
Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

AKUN	URAIAN	JUMLAH		NAIK/ TURUN (%)
		2025	2024	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	553.011.628	646.796.085	-14,50
521113	Tubuh	126.316.821	173.810.682	-27,33
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	104.520.000	96.040.000	8,83
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	121.566.639	261.713.036	-53,55
521211	Belanja Bahan	48.587.580	54.190.400	-10,34
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	800.000	-	0,00
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3.139.774.722	2.976.692.008	5,48
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	24.981.660	21.611.700	15,59
522141	Belanja Sewa	-	39.000.000	-100,00
522151	Belanja Jasa Profesi	26.100.000	50.400.000	-48,21
522191	Belanja Jasa Lainnya	440.591.665	154.920.000	184,40
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	681.786.313	1.270.470.769	-46,34
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	69.042.000	112.485.000	0,00
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	102.357.030	561.998.450	-81,79
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	64.997.000	150.290.000	0,00
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	26.245.000	27.430.000	-4,32
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	281.784.000	244.686.000	0,00
	Jumlah	5.812.462.058	6.842.534.130	-15,05

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.030.072.072,00 atau 15,05% dibandingkan 31 Desember 2024. Penurunan realisasi belanja barang dikarenakan adanya efisiensi belanja barang terkait dengan pada tahun 2025 serta adanya efisiensi anggaran perjalanan dinas sebesar 50% sehingga hal tersebut mempengaruhi turunnya realisasi belanja barang pada tahun 2025.

Belanja
Modal
Rp589.12
9.280,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi belanja modal lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp589.129.280,00 dan Rp2.659.646.000,00. Rincian perbandingan belanja modal adalah sebagai berikut:

Tabel B.5
Realisasi Belanja Modal
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024

AKUN	URAIAN	JUMLAH		NAIK/ TURUN (%)
		2025	2024	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	589.129.280	2.659.646.000	-77,85
536111	Belanja Modal Lainnya	-	-	0,00
	Jumlah	589.129.280	2.659.646.000	-77,85

Realisasi belanja modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp2.070.516.720,00) atau 77,85% dibanding 31 Desember 2024. Penurunan dikarenakan efisiensi pengadaan belanja modal peralatan dan mesin.

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja
Modal
Peralatan
dan Mesin
Rp589.12
9.280,00

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp589.129.280,00 dan Rp2.659.646.000,00. Rincian perbandingan realisasi belanja modal peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

Tabel B.5.1
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024

AKUN	URAIAN	2025	2024	TURUN (%)
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	589.129.280	2.659.646.000	-77,85
536111	Belanja Modal Lainnya	-	-	0,00
	Jumlah	589.129.280	2.659.646.000	-77,85

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada 31 Desember 2025 mengalami mengalami penurunan sebesar (Rp2.070.516.720,00) atau 77,85% dibanding 31 Desember 2024. Penurunan dikarenakan efisiensi belanja pada

tahun 2025. Berikut adalah rincian pembelian belanja modal peralatan dan mesin Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes TA 2025:

Tabel B.5.2
Rincian pembelian Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Untuk Periode 31 Desember 2025

Uraian	Jumlah	Harga	Grand Total
Dispenser	1	Rp3.490.000	Rp3.490.000
A.C. Split	1	Rp9.250.000	Rp9.250.000
A.C. Split	1	Rp10.750.000	Rp10.750.000
A.C. Split	1	Rp17.000.000	Rp17.000.000
Lemari Es	1	Rp9.500.000	Rp9.500.000
Peralatan Personal Komputer Lainnya	1	Rp2.200.000	Rp2.200.000
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Rp12.765.000	Rp12.765.000
P.C Unit	1	Rp19.314.000	Rp19.314.000
UV Cabinet	2	Rp3.774.000	Rp7.548.000
Gordyin/Kray	1	Rp59.381.280	Rp59.381.280
Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	1	Rp180.825.000	Rp180.825.000
Humidifier	1	Rp5.999.000	Rp5.999.000
Koper/Tas	2	Rp1.578.500	Rp3.157.000
Kursi Besi/Metal	3	Rp1.199.000	Rp3.597.000
Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	2	Rp3.024.750	Rp6.049.500
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Rp12.987.000	Rp12.987.000
P.C Unit	1	Rp19.800.000	Rp19.800.000
Meja Kerja Kayu	3	Rp4.500.000	Rp13.500.000
Kursi Besi/Metal	1	Rp29.250.000	Rp29.250.000
Blood Chemistry Analysis	1	Rp68.600.000	Rp68.600.000
Ukur Tinggi Badan	1	Rp15.540.000	Rp15.540.000
Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	1	Rp7.975.000	Rp7.975.000
Kursi Plebotomi	1	Rp7.381.500	Rp7.381.500
Infra Red	2	Rp31.635.000	Rp63.270.000
Jumlah			Rp589.129.280

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar

Rp

2.663.803.869
,00

C.1 Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 2.663.803.869,00 dan Rp 2.144.576.555,00. Terdapat kenaikan sebesar 24,07% atau sebesar Rp 516.131.372,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Piutang Bukan

Pajak

Rp

5.123.800,00

C.1.1 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 5.123.800,00 dan Rp 6.057.800,00 dengan persentase penurunan sebesar 15,42%. Piutang PNBPN merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Untuk periode ini, piutang bukan pajak adalah klaim BPJS bulan pelayanan November dan Desember 2025. Rincian Piutang PNBPN disajikan sebagai berikut:

Tabel C.1.1
Rincian Piutang PNBPN

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Piutang PNBPN			
BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL)	5.123.800	6.057.800	(934.000)
Jumlah	5.123.800	6.057.800	(15,42)

Penyisihan

Piutang Tidak

Tertagih

C.1.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp (25.620,00) dan (Rp 30.290,00)

Piutang Bukan
Pajak (Rp
25.620,00)

terdapat penurunan sebesar Rp 4.670 atau (15,42%). Penyisihan piutang tak tertagih-piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Angka yang didapat dari 1/1000 dari piutang bukan pajak.

Piutang Bukan
Pajak (Netto)
Rp
5.098.180,00

C.1.3 Piutang Bukan Pajak (Netto)

Nilai Piutang Bukan Pajak (Netto) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 5.098.100,00 dan Rp 6.027.510,00 terdapat penurunan sebesar Rp (929.330,00) atau sebesar (15,42%).

Persediaan Rp
2.658.705.689
,00

C.1.4 Persediaan

Persediaan adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan / atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 2.658.705.689,00 dan Rp 2.138.549.045,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. C.1.4

Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Jenis	Kode Akun	2025	2024
Barang Konsumsi	117111	217.034.695	324.854.929
Bahan untuk pemeliharaan	117113	9.403.599	18.518.065
Suku Cadang	117114	71.356.893	54.161.726
Bahan Baku	117131	1.333.044.381	1.193.276.406
Persediaan lainnya	117199	1.027.866.121	547.737.919
Jumlah		2.658.705.689	2.138.549.045

Aset Tetap Rp
2.959.448.783
,00

C.2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 2.959.448.783,00 dan Rp 3.530.024.019,00 .

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap UPK Kemenkes berupa Peralatan dan Mesin.

Peralatan dan
Mesin Rp
26.532.561.13
9,00

C.2.1 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp 26.532.561.139,00 dan Rp 25.735.964.174,00. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. C.2.1
Mutasi Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

Saldo awal nilai Perolehan per 31 Desember 2024	25.735.964.174
Mutasi Tambah:	
Pembelian	589.129.280
Transfer Masuk	309.019.900
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(101.552.215)
Saldo per 31 Desember 2025	26.532.561.139

Terdapat mutasi tambah sebesar Rp 898.149.180,00 yakni pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp 589.129.280,00 dan transfer masuk sebesar Rp 309.019.900,00 yang terdiri dari :

Tabel. C.2.2
Pembelian Peralatan dan Mesin TA 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Vol	JUMLAH BIAYA
Pengadaan Fasilitas Perkantoran		
Dispenser	1	3.490.000
A.C. Split	1	9.250.000

A.C. Split	1	10.750.000
A.C. Split	1	17.000.000
Lemari Es	1	9.500.000
Tirai IGD	1	59.381.280
Meja Kantor Ergonomi	3	13.500.000
Kursi Kantor Ergonomi	3	3.597.000
Kursi Plebotomi	1	7.381.500
Dental Kursi Pemeriksa	3	29.250.000
Koper Alat	2	3.157.000
Dehumidifier	1	5.999.000
Pengadaan Perangkat Pengolah Data		
Barcode Scanner	1	2.200.000
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	25.752.000
Personal Computer	2	39.114.000
Pengadaan Alat Kesehatan		
Dental UV Sterilizer	2	7.548.000
Autoclave	1	180.825.000
Stetoscope Littman	2	6.049.500
Stetoskop littmann master cardiology	1	7.975.000
Alat Pemeriksaan HbA1c	1	68.600.000
Alat IRR	2	63.270.000
Seca portable stadiometer	1	15.540.000
Jumlah Pembelian		589.129.280

Pembelian alat ini merupakan pengadaan 19 unit fasilitas perkantoran, pengadaan 5 unit perangkat pengolah data dan pengadaan 10 unit alat kesehatan.

Tabel. C.2.3
Transfer Masuk Peralatan dan Mesin TA 2025
(Dalam Rupiah)

URAIAN	Vol	JUMLAH BIAYA
Pengadaan Fasilitas Perkantoran		
A.C. Split	21	203.019.900
Cold Storage	1	106.000.000
Jumlah Transfer Masuk		309.019.900

Transfer masuk ini merupakan fasilitas perkantoran berupa AC Split sebanyak 21 unit dari Biro Umum yang sudah dipergunakan oleh Unit Pelayanan Kesehatan dan Cold Storage sebanyak 1 unit dari Setditjen Kesehatan Lanjutan.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
(Rp
23.573.112.356,00)*

C.2.2 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing (Rp 23.573.112.356,00) dan (Rp 22.205.940.155,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 merupakan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin.

*Aset Lainnya
Rp 0,00*

C.3 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 6.415.625,00. Terjadi penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp 6.415.625,00) atau sebesar (100%)

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Aset lainnya terdiri dari aset tak terwujud dan aset lain-lain.

*Aset Tak
Berwujud
Rp
1.001.960.000,00*

C.3.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah tetap sebesar Rp1.001.960.000 dan Rp1.001.960.000,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI dapat berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Tidak terdapat mutasi pada tahun 2025.

Tabel C.3.1
Rincian Aset Tak Berwujud

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tgl Perolehan	Nilai
1	Simklinik	09/12/2014	571.560.000
2	LIS (Sistem Informasi Laboratorium)	09/09/2020	192.000.000
3	Sipeluk	14/06/2021	94.500.000

4	Website UPK	29/10/2021	49.000.000
5	Pengembangan Simklinik	-	94.900.000
Jumlah			1.001.960.000

Aset Lain-lain

Rp

2.678.291.112

,00

C.3.2 Aset Lain – lain

Aset lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 2.678.291.112,00 dan Rp 2.576.738.897,00.

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel C.3.2
Mutasi Aset Lain-lain

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	2.576.738.897
Mutasi Tambah:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	101.552.215
Mutasi Kurang:	
Penghapusan	-
Saldo Per 31 Desember 2025	2.678.291.112

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan adalah dari penghentian aset dari penggunaan dalam operasional Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes senilai Rp 101.552.215,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel C.3.2.1
Rincian Mutasi Aset Lain-lain

(Dalam Rupiah)

Nama Barang	Unit	Nilai
Kursi Besi/Metal	1	350.000
Televisi	1	49.700.000
Sterilisator	2	6.820.000
Korentang	4	1.272.740
Infra Red	1	2.365.000
Pulse Oxymeter	3	21.000.000
Timer Switch	1	398.475
Printer	2	7.216.000

Scanner	1	12.430.000
		101.552.215

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi
Aset Lainnya
(Rp
3.680.251.112
,00)*

C.3.3 Akumulasi Penyusutan/ Amortasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp 3.680.251.112,00) dan (Rp 3.572.283.272,00)

Tabel. C.3.3
Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya
TA 2025

(Dalam Rupiah)

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	1.001.960.000	(1.001.960.000)	-
Jumlah			
Aset Lain-lain	2.678.291.112	(2.678.291.112)	-
Jumlah	3.680.251.112	(3.680.251.112)	-

*Ekuitas
Rp
5.623.252.652
,00*

C.4 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 5.623.252.652,00 dan Rp 5.681.016.199,00 . Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNPB
Rp 699.510.268,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp699.510.268,00 dan Rp665.068.271,00. pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel D.1
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2025 dan 2024

Akun	Keterangan	2025	2024	%
425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	586,241,468	554,957,271	5.64
425312	Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan	32.208.800	32,484,000	(0,84)
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	81,060,000	77,627,000	4.42
	Jumlah Total	699.510.268	665,068,271	5.179

Terdapat peningkatan cukup signifikan pada pendapatan dari badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Kesehatan serta pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan yang disebabkan karena meningkatnya nilai pendapatan di UPK dibanding tahun 2024.

Beban Pegawai
Rp6.190.685.675,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir sampai dengan

31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.190.685.675,00 dan Rp6.551.127.718,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh

pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel. D.2
Perbandingan Beban Pegawai 31 Desember 2025 dan 2024

Akun	Uraian	2025	2024	%
511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,662,438,200.	1,795,640,000.	(7.42)
511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	-3,878,500.	-1,197.	323,918.38
511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-15.	0.	#DIV/0!
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	20,691.	25,337.	(18.34)
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	111,725,840.	120,372,440.	(7.18)
511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-387,850.	0.	#DIV/0!
511122	Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	-155,140.	0.	#DIV/0!
511122	Beban Tunj. Anak PNS	28,031,116.	32,040,470.	(12.51)
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	10,080,000.	25,200,000.	(60.00)
511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	-500,000.	0.	#DIV/0!
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	226,565,000.	252,670,000.	(10.33)
511125	Beban Tunj. PPh PNS	22,757,153.	24,423,901.	(6.82)
511126	Beban Tunj. Beras PNS	79,662,000.	87,555,780.	(9.02)
511126	Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	-289,680.	0.	#DIV/0!
511129	Beban Uang Makan PNS	241,143,000.	238,083,000.	1.29
511134	Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS	27,600,000.	27,600,000.	-
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	5,110,000.	5,850,000.	(12.65)
511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0.	-740,150.	(100.00)
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	239,285,432.	182,360,800.	100.00
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	4,200.	3,761.	100.00
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	14,050,776.	9,266,000.	100.00

511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	2,973,548.	1,596,912.	100.00
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	29,500,000.	23,760,000.	100.00
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	12,196,735.	8,255,880.	100.00
511628	Beban Uang Makan PPPK	39,229,000.	28,668,000.	100.00
511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	740,000.	0.	100.00
512211	Beban Uang Lembur	278,668,000.	263,538,000.	100.00
512212	Beban Uang Lembur PPPK	46,941,000.	31,899,000.	100.00
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2,781,838,310.	3,128,990,961.	(11.09)
512414	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) PPPK	335,336,859.	264,068,823.	100.00
JUMLAH		6,190,685,675.	6,551,127,718.	(5.50)

Terjadi penurunan pada Beban Pegawai karena terdapat revisi pengembalian anggaran karena anggaran tersebut rencana digunakan untuk penerimaan CPNS yg tadinya diusulkan untuk 5 orang CPNS ternyata yg diterima hanya 3 orang dan untuk PPPK yg diusulkan untuk 7 orang tetapi yg diterima hanya 2 PPPK.

*Beban Persediaan
Rp2.565.500.027,00*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.565.500.027,00 dan Rp2.567.997.443,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian beban persediaan adalah sebagai berikut:

Tabel. D.3
Perbandingan Beban Persediaan 31 Desember 2025 dan 2024

Akun	URAIAN	2025	2024	%
593111	Beban Persediaan Konsumsi	136,731,196.	236,553,096.	(42.20)
593131	Beban Persediaan Bahan Baku	1,313,777,755.	1,163,399,111.	12.93
593149	Beban Persediaan Lainnya	1,114,991,076.	1,168,045,236.	(4.54)
	JUMLAH	2,565,500,027	2,567,997,443	(0.10)

Terdapat penurunan pemakaian persediaan karena pada namun tidak signifikan hal ini dikarenakan hasil negosiasi saat proses pengadaan.

*Beban Barang dan
Jasa
Rp1,446,475,993,00*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1,446,475,993,00 dan Rp1.498.484.803,00. Beban barang dan jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Tabel D.4
Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025 dan 2024

AKUN	URAIAN	2025	2024	%
521111	Beban Keperluan Perkantoran	553,011,628.	646,796,085.	(14.50)
521113	Beban Penambahan Daya Tahan Tubuh	126,316,821.	173,810,682.	(27.33)
521115	Beban Honor Operasional Satker	104,520,000.	96,040,000.	8.83
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	121,566,639.	261,713,036.	(53.55)
521211	Beban Bahan	48,587,580.	54,190,400.	(10.34)
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya		2,900.	

521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	800,000.	0.	#DIV/0!
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	24,981,660.	21,611,700.	15.59
522141	Beban Sewa		39,000,000.	
522151	Beban Jasa Profesi	26,100,000.	50,400,000.	(48.21)
522191	Beban Jasa Lainnya	440,591,665.	154,920,000.	100.00
	Jumlah Beban Barang dan Jasa	1,446,475,993	1,498,484,803	(3.47)

Terdapat penurunan beban barang dan jasa terutama, hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga terdapat penyesuaian belanja.

*Beban Pemeliharaan
Rp833.919.833,00*

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp833.919.833,00 dan Rp1.452.127.401,00. Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel D.5

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 dan 2024

AKUN	URAIAN	2025	2024	%
523121	Beban pemeliharaan peralatan dan mesin	681,786,313	1,270,470,769	(46.34)
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	69,042,000	112,485,000	(38.62)
593113	Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan	47,959,182	48,503,143	(1.12)
593114	Beban persediaan suku cadang	35,132,338	20,668,489	69.98
	JUMLAH	833,919,833	1,452,127,401	(42.57)

Terdapat penurunan yang signifikan pada akun pemeliharaan peralatan dan mesin serta pemeliharaan lainnya. Hal ini

disebabkan adanya blokir sebagian dan belum adanya usulan pemeliharaan pada alat kesehatan.

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp475.383.030,00*

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir sampai dengan

31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp475.383.030,00 dan Rp984.404.450,00. Beban perjalanan dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Berikut adalah rincian dari beban perjalanan dinas:

Tabel D.6
Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 2024

Akun	URAIAN	2025	2024	%
524111	Beban perjalanan biasa	102,357,030	561,998,450	(81.79)
524113	Beban Perjalanan dinas dalam kota	64,997,000	150,290,000	(56.75)
524114	Beban perjalanan dinas paket meeting dalam kota	26,245,000	27,430,000	(4.32)
524119	Beban perjalanan dinas paket meeting luar kota	281,784,000	244,686,000	15.16
	JUMLAH	475,383,030	984,404,450	(51.71)

Terdapat penurunan sebesar Rp509.021.420,00,00 atau sebesar 51,71% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Hal ini disebabkan efisiensi perjalanan dinas Kementerian Kesehatan.

*Beban Penyusutan
Dan amortisasi
Rp1.166.120.141,00*

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.166.120.141,00 dan Rp1.493.668.434,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

Tabel D.7
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 dan 2024

Akun	Uraian	2025	2024	%
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,159,704,516	1,433,502,809	(19.10)
592115	Beban amortisasi software	6,125,000	59,875,000	(89.77)
592222	Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	290,625	290,625	100.00
	Jumlah	1,166,120,141	1,493,668,434	(21.93)

Secara umum beban penyusutan dan amortisasi mengalami penurunan sebesar (Rp327.548.293,00) atau sebesar (21,93%) disebabkan karena secara umum usia aset telah mencapai umur ekonomis.

*Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp(4.670,00)*

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban penyisihan piutang tak tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp(4.670,00) dan Rp30.290,00. Beban penyisihan piutang tak tertagih merupakan beban penyisihan atas piutang BPJS Klinik Utama

Bakti Husada Kemenkes pada bulan pelayanan November 2025.

Surplus/(Defisit) dari kegiatan non operasional lainnya Rp(89.204.094,00)

D.10 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp(89.204.094,00) dan Rp(7.279.498,00). Rincian Kegiatan Non Operasional sebagai berikut:

Tabel D.10

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan 2024

Akun	URAIAN	2025	2024	%
593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	9,018,740	-	100
596121	Beban persediaan rusak/usang	80,185,354	7,279,498	1,001.52
	Jumlah Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional	(89,204,094)	7,279,498)	1,125.42

Terdapat penurunan defisit kegiatan non operasional hal tersebut karena pada tahun 2025 terdapat beban penyesuaian nilai persediaan dan Rp9.018.740,00 dan beban kegiatan non operasional lainnya yang merupakan beban persediaan yang rusak/usang senilai Rp80.185.354,00.

Surplus/(Defisit) LO Rp(12.067.773.855,00)

D.10 Surplus/(Defisit) Laporan Operasional

Surplus/(Defisit) Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp(12.067.773.855,00) dan Rp(13.890.051.766,00).

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp
5.681.016.199,00*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.681.016.199,00 dan Rp 4.199.577.470,00.

*Surplus/ Defisit -
LO
(Rp.
12.067.773.855,0
0)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar (Rp. 12.067.773.855,00) dan (Rp. 13.890.051.766,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional. surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp
245.311.371,00*

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp. 245.311.371,00 dan Rp Rp.0,00. Koreksi tersebut merupakan saldo awal atas persediaan yang baru diketahui ada di UPK dan belum tercatat dalam SAKTI dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. E.3
Koreksi Nilai Persediaan

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Harga
1	Safety Box 5 Liter	1.650	22.000	36.300.000
2	Alkohol Swab	3.533	50.100	177.003.300
3	Auto Disposable Syringe 0,3 ml 24G X 1"	13.440	1.443	19.393.920
4	Auto Disposable Syringe 0,5 ml 24G X 1"	7.000	1.221	8.547.000
5	TP Disposable Syringe with Needle 3 ml	3.331	1.221	4.067.151
JUMLAH				245.311.371

*Koreksi Lain-lain
Rp 0,00*

E.3.2 Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp. 0,00 dan Rp 7.328,00. Koreksi tersebut merupakan koreksi pencatatan karena adanya selisih biaya admin pembayaran klaim

BPJS pada tahun sebelumnya.

Transaksi Antar
Entitas Rp
11.764.698.937,0
0

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 11.764.698.937,00 dan Rp 15.371.483.167,00. Transaksi antar adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL. antar KL. antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel. E.4
Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	12.592.277.013
Diterima Dari Entitas Lain	(700.444.268)
Transfer Keluar	(127,945,308)
Transfer Masuk	811.500
JUMLAH	11.764.698.937

Ekuitas Akhir Rp
5.623.252.652,00

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 5.623.252.652,00 dan Rp 5.681.016.199,00. Terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sebesar (Rp 57.763.547,00) atau sebesar 1.02%

PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 Capaian Output Strategis Lainnya

Selama periode Triwulan III Tahun Anggaran 2025 output strategis yang telah dicapai Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes sebagai berikut:

1. Alat Kesehatan memiliki output strategis berupa :
 - Pengukur tinggi badan/ Stadiometer.
 - Dental UV Sterilizer
 - Autoclave
 - Stethoscope Littman
 - Stetoskop littmann master cardiology
 - Alat Pemeriksaan HbA1c
 - Alat IRR
 - Seca portable stadiometer
2. Obat-obatan dan BMHP memiliki output strategis berupa pengadaan obat-obatan, bahan medis habis pakai dan pengadaan reagen.
3. Perangkat Pengolah Data Dan Informasi memiliki output strategis berupa:
 - Barcode Scanner
 - Scanner Scan Snap
 - Personal Computer
4. Operasional dan Pemeliharaan UPT Non BLU memiliki output strategis berupa:
 - Pemeliharaan alat kesehatan
 - Pemeliharaan dan perbaikan kendaraan
 - Pengisian tabung oksigen
 - Biaya langganan limbah
 - Kalibrasi
5. Layanan Pemeliharaan Jaringan dan Komputer belum terealisasi
6. Pelatihan Bidang Kesehatan
 - Peningkatan keterampilan dan keahlian individu Pegawai unit pelayanan kesehatan
 - Kelas Edukasi
 - Peningkatan Kompetensi Penanganan Komplain Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima
7. Layanan Umum Memiliki Output Strategis berupa:
 - Pelatihan Pembuatan SOP
 - Konsumsi medical check up di upk
 - Transportasi lokal
 - Layanan dukungan kesehatan/administrasi
 - Jasa Konsultan UPK
8. Layanan Sarana Internal memiliki output strategis berupa :
 - AC
 - Dispenser
 - Tirai IGD
 - Meja Kantor Ergonomi
 - Kursi Kantor Ergonomi
 - Kursi Plebotomi

- Dental Kursi Pemeriksa
 - Koper Alat
 - Kulkas 2 pintu
 - Dehumidifier
9. Layanan Kepegawaian Satker UPT Vertikal memiliki output strategis berupa Perkasa
10. Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan di UPT Vertikal belum terealisasi
11. Layanan Perkantoran memiliki output strategis berupa:
- Belanja gaji dan tunjangan
 - Operasional dan pemeliharaan kantor

Secara rinci output strategis Triwulan IV Unaudited Tahun Anggaran 2025. Dapat disampaikan dalam tabel di bawah ini:

**LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kementerian/Lembaga : Kemeterian Kesehatan
Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
Satuan Kerja : Unit Pelayanan Kesehatan
Alokasi : Rp. 13.281.797.000

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran			
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
015404	Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI	13.281.797.000	12.597.488.198	94,84				
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN							
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Kesehatan Lanjutan							
CAB.002	Alat Kesehatan	354.374.000	350.607.500	98,94	11	11	Unit	100
CAB.003	Obat-obatan dan BMHP	2.980.731.000	2.968.245.080	99,58	33	33	Paket	100
CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Informasi	70.244.000	67.066.000	95,48	5	5	Unit	100
CCB.002	Operasional dan Pemeliharaan UPT Non BLU	645.364.000	504.966.473	78,25	381	381	Paket	100
CCL.001	Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Komputer UPT BLU	139.960.000	69.042.000	98,66	2	2	Unit	100
DCM.002	Pelatihan Bidang Kesehatan	346.851.000	195.046.580	99,72	425	425	Orang	100
EBA.962	Layanan Umum	788.023.000	547.437.665	99,70	1	1	Layanan	100
EBB.951	Layanan Sarana Internal	174.533.000	172.255.780	98,70	13	13	Unit	100
EBC.001	Layanan Kepegawaian Satker UPT Vertikal	30.600.000	30.490.000	99,64	75	75	Orang	100
FAE.001	Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan di UPT Vertikal	40.320.000	19.800.000	90,17	1	1	Laporan	100
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen							
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Lanjutan							
EBA.994	Layanan Perkantoran	7.710.797.000	7.672.531.120	99,50	2	2	Layanan	100